

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Partisipasi Masyarakat**

###### **2.1.1.1 Definisi Partisipasi Masyarakat**

Kata partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ialah keadaan dalam suatu aktivitas, keikutsertaan, atau peran. Partisipasi merupakan keikutsertaan individu atau masyarakat dalam suatu hal yang dapat menimbulkan tanggung jawab dengan pencapaiannya kemudian muncul rasa tanggung jawab pada dirinya. Partisipasi masyarakat sebagai keadaan terlibat dalam suatu proses pembangunan, dimana masyarakat mempunyai peran dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut (H. A. R. Tilaar, 2009, hlm.287) dalam (Rahmawati et al., 2021, hlm.593) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat adalah salah satu tujuan dari dorongan untuk menciptakan masyarakat demokratis melalui desentralisasi yang dapat mengurangi kebutuhan rencana dari bawah (*bottom-up*) dengan cara melibatkan masyarakat untuk memberikan partisipasi dalam proses pembuatan rancangan dan menciptakan pembangunan. Seseorang yang terlibat pada interaksi terhadap kondisi agar mencapai tujuan membutuhkan kerja sama dan tanggung jawab. Sehingga, seseorang yang melibatkan berkaitan dengan masyarakat dapat dikatakan bentuk partisipasi masyarakat.

Menurut (Soetomo, 2012) dalam (Rahmawati et al., 2021, hlm.593) beranggapan bahwa partisipasi masyarakat yaitu suatu peran dengan adanya pembangunan untuk mengarah terhadap meningkatnya taraf hidup masyarakat tersebut. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam lingkungan pedesaan merupakan perwujudan kepada perilaku masyarakat dalam mendorong perubahan dengan hubungan timbal balik. Hal tersebut, artinya ada perbuatan yang tergantung kepada masyarakat serta desa untuk berupaya dalam meningkatkan kemajuan.

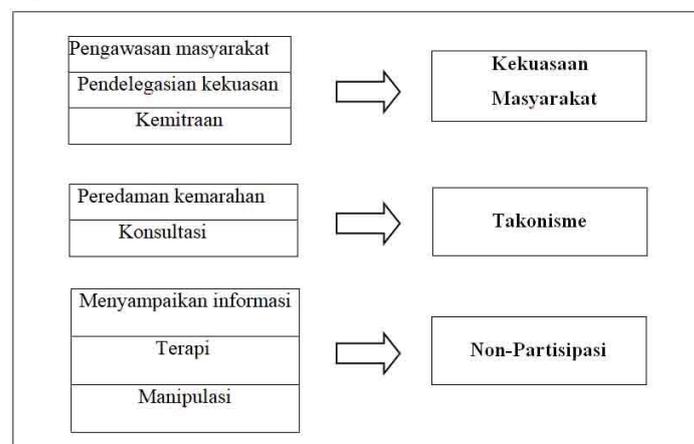
Pembangunan yang memberikan keberhasilan membutuhkan partisipasi secara aktif dari masyarakat sehingga selain pembangunan yang memberikan pengaruh tetapi

akan mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Menurut (Conyers et al., 1991, hlm.154) menyebutkan pentingnya tiga dasar utama partisipasi masyarakat:

- a. Partisipasi masyarakat sebagai alat guna mengumpulkan tentang keadaan, kebutuhan, dan kegiatan masyarakat sekitar.
- b. Masyarakat akan memberikan kepercayaan pembangunan apabila yang sedang dilakukan merasa melibatkan dalam proses perencanaan dan persiapan sehingga memiliki rasa tanggung jawab.
- c. Adanya asumsi bahwa suatu hak demokrasi apabila mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan karena partisipasi masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan kekuatan terutama pada saat pengambilan keputusan yaitu tahap mengidentifikasi masalah, memecahkan permasalahan, dan hingga implementasi berbagai kegiatan.

#### 2.1.1.2 Derajat Partisipasi Masyarakat

Menurut Arnstein yang telah dikutip oleh (Salam, 2010, hlm.9-10) teori yang dapat diterapkan untuk mengukur partisipasi publik di setiap daerah yaitu tangga partisipasi (*ladder of participation*). Teori tersebut membagi bahwa partisipasi sebagai kekuasaan masyarakat untuk mempengaruhi perubahan pembuat kebijakan. Teori ini didasarkan pada tiga tahap partisipasi dengan membentuk depan anak tangga partisipasi yang dapat dilihat pada gambar 1.1.



**Gambar 1.1 Tangga Partisipasi (*Ladder of Participation*)**

(Sumber: materipelajar.com)

Berikut ini adalah penjelasan anak tangga partisipasi:

1. Manipulasi (*manipulation*). Bentuk tidak adanya interaksi dan esensi hanya memberikan partisipasi tanpa mengikutsertakan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Demikian, masyarakat sebagai partisipan di undangan forum namun tidak mengetahui tujuan yang akan dicapai.
2. Terapi (*therapy*). Sudah terjadi interaksi meskipun bersifat terbatas sehingga berinisiatif dari pemerintah dan terjadi komunikasi satu arah.
3. Menyampaikan informasi (*informing*). Masyarakat yang sudah diikutsertakan dalam forum memiliki hak memberikan pendapat, walaupun tidak terlibat langsung dalam penentuan keputusan.
4. Konsultasi (*consultation*). Antara pemerintah dengan masyarakat ada komunikasi dua arah.
5. Peredaman kemarahan (*placation*). Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan secara mendalam walaupun yang memutuskan tetap mempunyai hak lebih untuk mengambil keputusan.
6. Kemitraan (*partnership*). Hubungan pekerjaan yang setara antara pemerintah dengan masyarakat berawal dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Tetapi, masyarakat diberikan peluang untuk memberikan keputusan.
7. Pendelegasian kekuasaan (*delegated power*). Adanya kepercayaan penuh dari pemerintah kepada masyarakat agar mengatur kepentingan, bermula dari merencanakan, implementasi, pengawasan, dan perbaikan program. Maka masyarakat mempunyai rasa kekuasaan yang lebih jelas dan tanggung jawab atas ketercapaian programnya.
8. Pengawasan masyarakat (*citizen control*). Masyarakat dapat menjalankan berbagai macam kegiatan untuk kepentingan pribadi yang telah disetujui antar pihak tanpa adanya pemerintah turut mencampuri.

#### 2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut (Hadi Suroso et al., 2020, hlm.14) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari usia, tingkat

pendidikan, jenis pekerjaan, produktivitas penduduk, dan lamanya tinggal. Sementara faktor eksternal meliputi interaksi dan cara memimpin. Adapun yang dapat menghambat jalannya partisipasi masyarakat oleh Watson dalam (Soetomo, 2008, hlm.214) menyebutkan terjadinya hambatan-hambatan yang menyebabkan perubahan, salah satunya seperti hambatan dari individu yaitu ketergantungan. Pada pelaksanaan kegiatan pembangunan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah merupakan tantangan untuk mewujudkan keikutsertaan dengan aktif, karena perilaku ketergantungan tidak mempunyai tindakan dalam melakukan pembangunan. Berikut merupakan perbedaan faktor-faktor yang menghambat dalam partisipasi masyarakat:

a. Faktor internal

Menurut Plumer dalam (Suryawan, 2004, hlm.27) dalam (Sa'diyah El Adawiyah, 2020, hlm.97-98) Adapun berbagai faktor yang berdampak negatif terhadap masyarakat mengikuti proses partisipasi sebagai berikut:

1. Pekerjaan masyarakat. Orang dengan tingkat pengalaman kerja yang berbagai macam akan memberikan waktu ataupun tidak memberikan waktunya untuk ikut serta pada suatu kegiatan tertentu. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan ialah adanya perselisihan pada perjanjian terkait bekerja dengan harapan dalam ikut serta.
2. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat menghambat keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta pemahaman dan kemampuan mereka untuk melaksanakan berbagai bentuk partisipasi yang ada.
3. Jenis kelamin. Sebagian dapat mengetahui bahwa masyarakat terpengaruh oleh faktor ini, sehingga lebih sulit bagi masyarakat untuk ikut serta memberikan pendapat bahwa perempuan dengan laki-laki memiliki perspektif dan cara yang berbeda dalam memandang suatu situasi.
4. Kepercayaan. Masyarakat yang sangat heterogen, terutama pada hal agama dan budaya akan menunjukkan metode partisipasi yang akan digunakan. Keyakinan yang sangat sering berlawanan dengan ide-ide yang ada.

b. Faktor eksternal

Menurut Sunarti dalam (Sa'diyah El Adawiyah, 2020, hlm.98) faktor-faktor eksternal menyebutkan stakeholder yang berarti seluruh pihak yang mempunyai keperluan dan

memberikan pengaruh terhadap program. Stakeholder merupakan seseorang yang memiliki pengaruh secara signifikan atau mempunyai kedudukan yang penting.

#### 2.1.1.4 Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat

Menurut (Cohen & Uphoff) dalam (Yasril & Nur, 2018) menyebutkan bahwa partisipasi terbagi menjadi empat jenis sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, merupakan masyarakat terlibat memberikan ide atau gagasan yang berkaitan dengan kepentingan bersama sehingga dapat menetapkan suatu keputusan. Implementasi dari partisipasi ini dapat dilihat kehadiran mengikuti rapat perencanaan, keikutsertaan dalam berdiskusi, dan memberikan ide atau gagasan terhadap program yang akan dilakukan. Maka dari itu, partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan proses dari penentuan alternatif terhadap pertimbangan yang bersifat rasional maupun universal.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam program yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan ataupun tujuan. Dengan demikian partisipasi dalam pelaksanaan dapat dilihat melalui keaktifan masyarakat dalam mengikuti program, bentuk partisipasinya dapat berupa pikiran, tenaga, keahlian, uang, dan barang. Adapun bentuk partisipasi tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, partisipasi dalam pelaksanaan merupakan unsur dari menetapkan ketercapaian program yang dilakukan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, yaitu dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas. Dilihat dari segi kualitas, adanya peningkatan hasil dari keberhasilan program. Sedangkan dari segi kuantitas, ukuran keberhasilan dan kesesuaian tujuan program dapat membuktikan ketercapaian program.
4. Partisipasi dalam evaluasi, yaitu berhubungan dengan masyarakat untuk mengetahui program yang telah berjalan dilakukan dengan konsisten sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Jika perencanaan dan pelaksanaan terdapat kesesuaian, masyarakat harus memberikan proyeksi guna meningkatkan hasil pemanfaatan dari program yang telah dilakukan. Apabila tidak ada kesesuaian, maka harus melakukan evaluasi terkait ketidaksesuaian pada program yang telah dilakukan. Bentuk partisipasi ini diantaranya mengikuti kegiatan evaluasi dalam program, kesediaan untuk menilai dan mengawasi

program baik secara langsung atau tidak langsung, dan memberikan saran, masukan, dan kritik terhadap kegiatan.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada umumnya tidak sekedar keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan fisik maupun memberikan daya, tetapi terdapat berbagai bentuk partisipasi masyarakat lainnya. Dengan demikian, dalam proses atau pelaksanaan kegiatan pemberdayaan harus melibatkan masyarakat karena tahapan merupakan kesatuan dalam proses pembangunan. Selain itu, masyarakat juga dapat memahami dan menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta keadaan yang terdapat di masyarakat. Menurut Sastropetro, 1988 dalam (Erawati & Mussadun, 2013, hlm.34) mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yaitu:

- 1) Pikiran. Pikiran adalah jenis level pertama pada partisipasi dengan bentuk berupa ide ataupun sudut pandang dari individu atau kelompok tertentu yang mempunyai tujuan untuk memperoleh yang diharapkan.
- 2) Tenaga. Tenaga adalah jenis level kedua pada partisipasi dengan mengusahakan agar mampu menjalankan tugas dengan baik yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk memperoleh tujuan yang diharapkan.
- 3) Pikiran dan tenaga. Pikiran dan tenaga adalah jenis level ketiga pada tingkat partisipasi yang dilakukan oleh seluruh kelompok atau individu dalam memperoleh tujuan yang bersama.
- 4) Keahlian. Keahlian adalah jenis level keempat dalam partisipasi dilakukan dengan keahlian yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok. Hal tersebut, menjadi bagian yang diharapkan dalam menentukan keinginan.
- 5) Barang. Keinginan adalah jenis level kelima pada partisipasi yang menggunakan barang untuk menolong dalam mencapainya keberhasilan yang diharapkan.
- 6) Uang. Uang adalah jenis level keenam dalam partisipasi ini, uang digunakan sebagai alat untuk mengukur sesuatu yang diantisipasi. Biasanya tingkat partisipasi yang disebutkan di atas dilakukan oleh orang-orang kalangan atas.

## **2.1.2 Keberdayaan Masyarakat**

### **2.1.2.1 Konsep Keberdayaan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keberdayaan yaitu perihal berdaya, berarti kemampuan yang memiliki kekuatan atau daya. Maka definisi keberdayaan adalah proses pemberdayaan yang terjadi atas dasar kemandirian memanfaatkan potensi yang dimiliki. Keberdayaan memiliki makna sebagai upaya redistribusi kekuatan dari pihak yang mempunyai kekuatan untuk yang kurang memiliki daya. Dengan demikian, keberdayaan mengandung pengertian pengurangan tenaga dari pihak yang memiliki kekuatan dan penambahan daya untuk bagian yang diberdayakan.

Menurut Sumodiningrat dalam (Widjajanti, 2011, hal.16) mendefinisikan bahwa keberdayaan masyarakat menunjukkan adanya kemandiriannya yang dapat diperoleh melalui proses pemberdayaan masyarakat. Kemandirian masyarakat merupakan keadaan yang dirasakan oleh masyarakat dengan kesanggupan memperhatikan, menetapkan, dan melaksanakan sesuatu untuk memecahkan permasalahan.

Menurut Sulistiyani dalam (Musyarofah & Angin, 2016, hlm.7) menyebutkan bahwa dari perspektif etimologis, keberdayaan berasal dari istilah dasar yang menunjukan daya atau keahlian. Jadi, keberdayaan adalah suatu kemampuan masyarakat yang didapatkan dari pihak yang memiliki daya. Maka dari hal tersebut, masyarakat harus diberdayakan agar mengetahui kemampuannya melalui proses pembangunan yaitu sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dan bertanggung jawab terhadap risiko dari proses pembangunan.

Keberdayaan terjadi dalam tiga aspek diantaranya kognitif, afektif, dan psikomotorik yang akan memberikan kemandirian kepada masyarakat. Maka dari itu, masyarakat akan mencukupi perihal pengetahuan yang disertai dengan kemampuan kecakapan yang memenuhi, kuatkan oleh rasa membutuhkan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya. Menurut (Ambar Tegu, 2004, hlm.80-81) dalam (Srifitriani Yanmesli & Zairin, 2019, hlm.155) masyarakat akan mendapatkan keahlian/kekuatan dari waktu ke waktu melalui tahapan, yang diinginkan dari pemberdayaan adalah visualisasi dari konstruksi sosial tersebut akan meningkatkan komunitas dan masyarakat ideal.

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat sebagai pemeran pemberdayaan. Sasaran dari pemberdayaan tersebut merupakan masyarakat yang tidak mempunyai daya. Adapun tujuannya adalah untuk memandirikan masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia.

#### 2.1.2.2 Kelompok Lemah dan Ketidakberdayaan

Menurut (R. Hatu, 2010, hlm.244) tujuan utama pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat dan kelompok yang tidak mempunyai daya lainnya. Mereka yang dimaksud merupakan kelompok yang umumnya kurang mempunyai daya. Maka untuk melengkapi terkait pemberdayaan harus mengetahui konsep kelompok yang tidak mempunyai daya dan ketidakberdayaan yang dialami. Adapun beberapa kelompok yang dapat dikelompokkan sebagai kelompok tidak mempunyai kekuatan sebagai berikut:

- a. Kelompok lemah secara struktural yaitu lemah secara kelas, jenis kelamin, maupun beretnis.
- b. Kelompok lemah khusus seperti usia lanjut, anak-anak, remaja, disabilitas, dan masyarakat asing.
- c. Kelompok lemah secara personal yaitu mereka yang mempunyai masalah individu atau keluarga.

Selain itu, kelompok-kelompok tertentu merasakan pembedaan sikap. Contohnya masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, perempuan, populasi yang sudah tua, dan disabilitas merupakan orang yang tidak mempunyai daya. Tanggapan dan keadaan mereka yang berbeda dipandang sebagai penyimpangan. Seringkali, mereka kurang dihargai bahkan ditandai sebagai orang tidak rajin, tidak mempunyai kekuatan, dikarenakan oleh dirinya sendiri. Sedangkan, ketidakberdayaan adalah dampak dari ketidakadilan dan diskriminasi dalam beberapa aspek kehidupan tertentu.

Menurut Berger dan Nienhaus dalam (Suharto, 1997) dalam (R. Hatu, 2010, hlm.244) “struktur-struktur penghubung” (*mediating structures*) yang memungkinkan kelompok-kelompok lemah mengungkapkan harapan dan menyatakan keahliannya kepada lingkungan sosial yang lebih luas, kini cenderung melemah. Adanya industrilisasi

yang memunculkan spesialisasi kerja dan pekerjaan mobile sudah memperlemah lembaga yang mendapatkan peran untuk struktur kerja sama antara kelompok masyarakat lemah dengan masyarakat luas.

Organisasi sosial, kelompok agama, dan kelompok keluarga secara tradisional didefinisikan sebagai kelompok yang memberikan dukungan dan bimbingan, menyelesaikan konflik, dan memenuhi kebutuhan anggota yang secara bertahap menjadi semakin berkurang jumlahnya. Dengan demikian, sistem ekonomi pembayar tunggal dapat meningkatkan standar hidup dalam kelompok individu orang, tetapi tidak konsisten, sehingga secara bertahap mengurangi jumlah pengelompokan yang ada dalam populasi umum.

Menurut Kieffer dalam (R. Hatu, 2010, hlm.245), berpandangan bahwa ketidakberdayaan adalah hasil dari interaksi yang secara terus menerus pada seseorang dengan lingkungan, yang mencakup gabungan antara sikap menyalahkan diri sendiri, dan merasa tidak mampu dalam perjuangan politik. Menurut (Suharto, 1997, hlm.213-314) dalam (R. Hatu, 2010, hlm.245), ketidakberdayaan dapat berasal dari penilaian diri yang kurang baik; hubungan yang kurang baik dengan lingkungan atau bermula dari blokade dan hambatan yang berasal dari lingkungan yang lebih besar.

- a) Ketidakberdayaan bermula dari pendapat negatif seseorang dapat menyebabkan mereka menjadi tidak stabil karena pendapat negatif dari orang lain. Contohnya, perempuan ataupun golongan yang jumlah masyarakatnya lebih kecil merasa tidak memiliki daya karena mereka telah disosialisasikan untuk mengetahui dirinya sebagai orang yang tidak mempunyai kekuasaan yang seimbang dalam masyarakat.
- b) Ketidakberdayaan bermula dari pengalaman negatif pada saat berinteraksi antara orang yang disengsarakan yang menyebabkan mereka membahayakan. Misalnya, perempuan atau kelompok minoritas yang merasakan pengalaman negatif dengan masyarakat sekitar. Pengalaman kurang baik tersebut menyebabkan tidak mempunyai daya atau merasa tidak mampu, rendah diri, dan merasa tidak pantas masuk ke dengan komunitas sosial.
- c) Lingkungan yang merata dapat memberikan hambatan peran dan perbuatan kelompok tertentu. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kelompok yang tertindas tidak

mempunyai daya saat mengungkapkan atau mendapat kesempatan yang ada dimasyarakat. Contohnya, kebijakan yang membeda-bedakan kepada kelompok dalam mendapatkan pendidikan dan pekerjaan.

#### 2.1.2.3 Faktor Ketidakberdayaan Masyarakat

Menurut Syamsulbahri dalam (Ali Azis et al., 2005) dalam (R. Hatu, 2010, hlm.245) menyebutkan beberapa faktor ketidakberdayaan masyarakat:

- a. Orang yang termasuk tidak berdaya yaitu, tingkat penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupannya, yaitu makan, tempat tinggal, sekolah, dan perawatan kesehatan.
- b. Upaya untuk mengurangi jumlah masyarakat yang tidak memiliki kekuatan dalam keberlanjutan akan semakin sulit karena jika masyarakat tidak memiliki daya yang tersisa adalah rendahnya kemampuan untuk membantu dirinya dan sulit dijangkau.
- c. Identifikasi profil keluarga dan wilayah kurang mampu pada kegiatan, program, dan bentuk bantuan yang dilakukan membutuhkan penanggulangan kemiskinan di wilayah pedesaan dan perkotaan.
- d. Keberhasilan dan keefektifan program pemberdayaan masyarakat pada mendidik individu yang kurang mampu ditentukan oleh upaya serta implementasi dalam beberapa program anti kemiskinan. Meningkatkan dan menyempurnakan program, meningkatkan desentralisasi dan otonom dalam pengambilan keputusan, serta keinginan meningkatkan peran masyarakat yang secara aktif dengan efektif pendampingan harus mengacu pedoman pada program penanggulangan kemiskinan.
- e. Masalah mengenai kemiskinan tidak bermula dari permasalahan yang serius yakni ketimpangan daerah dan antar golongan penduduk.

#### 2.1.2.4 Indikator Keberdayaan

Menurut (Nugroho 2008) dalam (Musyarofah & Angin, 2016, hlm.9) mengungkapkan, indikator keberdayaan yaitu:

1. Akses, yakni yang memiliki persamaan kewenangan dalam mengakses sumber daya produktif di dalam lingkungan.
2. Partisipasi, yakni keaktifan dalam mengusahakan kekayaan atau sumber daya yang memiliki batas.

3. Kontrol, yaitu pria dengan wanita memiliki kemampuan sebanding dalam mengontrol penggunaan sumber daya atas pemanfaatan sumber daya.

Dari hasil kajian konseptual terkait pemberdayaan menjadikan pula indikator keberdayaan. Empat diantaranya berkaitan dengan derajat keberdayaan (Soeharto, 2008) dalam (Firmansyah, 2012, hlm.55):

1. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*), yaitu keinginan untuk berperan dalam mengembangkan program dan memiliki keinginan untuk berubah dalam pengembangan program yang sedang dilaksanakan.
2. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*), yaitu bertambahnya pengetahuan dan keterampilan, serta kemudahan bekerja sama dengan lembaga-lembaga eksternal.
3. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*), yaitu memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah hingga tuntas dan adanya perubahan peran dalam kelompok.
4. Tingkat kemampuan kerja sama dan solidaritas (*power with*), yaitu adanya kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan solidaritas terhadap sesama anggota kelompok.

Sedangkan lima lainnya bersangkutan dengan berbasis keberdayaan (Friedman, 1992) dalam (Firmansyah, 2012, hlm.56) yakni:

1. Pengembangan berbasis masyarakat.
2. Keberlanjutan.
3. Partisipasi masyarakat.
4. Pengembangan modal sosial masyarakat.
5. Penghapusan ketimpangan gender.

Adapun tingkatan keberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti dalam Susiladihardi dalam (Hurairah, 2008, hlm.90) dalam (Srifitriani Yanmesli & Zairin, 2019, hlm.155):

1. Tingkat keberdayaan pertama adalah memahami terpenuhinya kebutuhan hidupnya.
2. Tingkat keberdayaan kedua adalah akses dan pemahaman tentang berbagai sistem serta sumber daya dibutuhkan.

3. Tingkat keberdayaan ketiga adalah memiliki kesadaran penuh dalam berbagai potensi, kekuatan, dan kelemahan diri serta lingkungan.
4. Tingkat keberdayaan keempat adalah keahlian ikut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan yang memiliki manfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
5. Tingkat keberdayaan kelima adalah kemampuan memegang kendali diri sendiri dan lingkungan. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keaktifan dan perilaku masyarakat dalam menilai dan menganalisis berbagai kebijakan serta program pemerintahan juga lembaga.

### **2.1.3 Program Rebo Distan Keliling (REBONDING)**

Program Rebo Distan Keliling (REBONDING) merupakan program baru yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) untuk langsung ke lapangan dalam rangka mengunjungi kelompok binaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) di Kota Banjar. Program ini berupa monitoring bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan kegiatan-kegiatan yang berjalan, mengamati pelaksanaan keterampilan dalam memanfaatkan pekarangan, dan memberikan forum untuk memecahkan permasalahan. Kunjungan program Rebo Distan Keliling (REBONDING) dilakukan kepada Kelompok Wanita Tani dan Kelompok Tani yang berada di Kota Banjar.

Program Wali Kota Banjar di Tahun 2023 mengharapkan pertanian berbasis organik guna mewujudkan visi Kota Banjar menuju Kota Agropolitan. Adapun hal yang menjadi pusat perhatian kunjungan kepada Kelompok Wanita Tani adalah penataan lahan perkebunan yang memanfaatkan halaman pekarangan untuk menanam sayuran organik agar memiliki nilai ekonomi. Menurut (Maryani et al., 2019, hlm.23) dalam rangka pemberdayaan ekonomi, peran pemerintah antara lain membantu masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, membantu masyarakat dalam memperlancar kegiatan perekonomian (menyediakan saran terkait ekonomi), dan membantu pertumbuhan pendapatan masyarakat dengan mendorong akses dan bantuan modal.

## 2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian mengandung uraian hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga ada kaitanya permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai berikut:

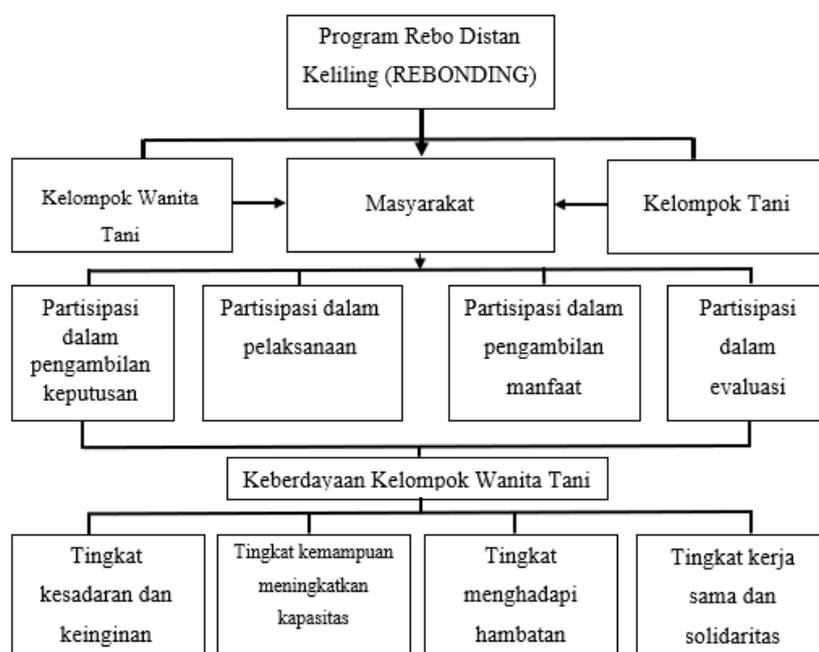
- 2.2.1 Jurnal Listiani et al., (2022) dengan judul “Pengaruh Keaktifan Masyarakat dalam Program Bank Sampah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat” dilatarbelakangi oleh peran aktif masyarakat dalam program bank sampah selain adanya peningkatan kesadaran merawat lingkungan namun dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Apabila tidak turut berpartisipasi dalam program bank sampah maka pengelolaan sampah menimbulkan tantangan juga mengalami permasalahan lingkungan. Adapun metode yang dilakukan oleh penelitian ini pendekatan kuantitatif korelasional dengan pengambilan sampel teknik *probability sampling* berjenis *simple random sampling*. Hasil penelitian menuturkan adanya hubungan baik dan signifikan antara keikutsertaan masyarakat pada program Bank Sampah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menyatakan dari nilai sig.  $.000 < \alpha 0.05$  berarti semakin tinggi keikutsertaan masyarakat pada program Bank Sampah maka tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Adapun faktor yang menghambat dalam program Bank Sampah adalah tidak ada pendampingan dalam pengelolaan sehingga produk belum maksimal untuk mencapai kualitas yang tinggi.
- 2.2.2 Jurnal Firmansyah (2012) dengan judul “Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut” penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pencapaian pemberdayaan. Adapun metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan survei. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat masyarakat pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang dilakukan di Kota Banjarmasin, tidak mampu memberdayakan masyarakat atau penerima manfaat, sehingga program tersebut tidak dapat disebut program pemberdayaan

masyarakat. Selain itu, salah satu faktor yang mempengaruhi pemberdayaan adalah dinamika perilaku kelompok dan fasilitator.

- 2.2.3 Jurnal Huky Arvi Loany & Murdianto (2021) dengan judul “Hubungan Efektivitas Program *Corporate Social Responsibility* dengan Tingkat Keberdayaan Masyarakat” peneliti menggunakan metode berupa kombinasi yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Hasil dari data yang telah diukur pada tingkat keberdayaan masyarakat menunjukkan kategori tinggi dengan nilai sebesar 51.4%. Adapun hubungan yang sangat kuat antara efektivitas program CSR dengan tingkat keberdayaan masyarakat pada nilai korelasi sebesar 0.940 dan signifikansi 0,000. Peneliti menuturkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat efektivitas program CSR dengan tingkat keberdayaan masyarakat. Masyarakat menjadi berdaya dengan diadakannya program CSR. Selain itu, pelatihan dalam program CSR terdapat peningkatan keterampilan masyarakat sehingga mendapatkan hasil produk yang memiliki nilai jual tinggi.
- 2.2.4 Jurnal Ramadani et al., (2022) dengan judul “Pengaruh Keberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Potensi Lokal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Kelompok Wanita Tani” metode yang digunakan adalah metode kuantitatif korelasional pada teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, angket, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh pada kegiatan sehari-hari masyarakat dalam hal penggunaan sumber daya lokal dan meningkatkan rasa memiliki anggota KWT. Signifikansi statistik penelitian ini ditunjukkan oleh hasil hipotesis, yang menunjukkan nilai probabilitas sekitar 0,031. Hasil variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dengan koefisien determinasi R Kuadrat sebesar 0,126, artinya kontribusi variabel X terhadap kesejahteraan variabel Y setinggi 12%. Sekitar 88% varians berasal dari variabel lain yang tidak termasuk dalam model. Ditemukan hubungan yang lemah antara variabel keberdayaan penduduk dengan variabel kesejahteraan penduduk, menurut nilai korelasi berganda dengan perolehan nilai sebesar 0,355.
- 2.2.5 Jurnal Astrini (2021) dengan judul “Dampak Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani Terhadap Kesejahteraan Keluarga” Salah satu metode yang

digunakan adalah metode survei yang menggunakan kuesioner. Menurut hasil penelitian, mayoritas anggota KWT berasal dari Filipina, dengan 63% responden telah menikah setidaknya selama 50 tahun dan 63% lainnya tidak menikah setidaknya selama 60 tahun. Pekerjaan anggota KWT diawasi oleh Ibu Rumah Tangga. Setiap anggota KWT adalah instruktur untuk kelas 12, dan anggota KWT diperintah oleh Strata 1. Sekitar 75% penduduk memiliki pendapatan lebih dari Rp 5.000.000 per bulan. Sebagian besar anggota KWT telah berpartisipasi dalam kegiatan organisasi setidaknya selama satu tahun. Setiap anggota KWT merasakan dampak dari peningkatan baik tingkat pendidikan maupun tingkat pendapatan. Peningkatan pendapatan rata-rata < 2% per bulan.

### 2.3 Kerangka Konseptual



**Gambar 1.2 Kerangka Konseptual**

(Sumber: Data Peneliti, 2023)

Keterangan :

→ : Pengaruh Parsial

Berdasarkan tabel tersebut, maka diuraikan bahwa penelitian ini membahas mengenai pengaruh partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani pada program Rebo Distan Keliling terhadap tingkat keberdayaan. Dalam program Rebo Distan Keliling ada dua kelompok binaan yaitu Kelompok Wanita Tani dan Kelompok Tani dengan tujuan untuk meninjau perkembangan kegiatan-kegiatan yang berjalan serta mengamati beberapa implementasi teknologi yang memiliki inovasi dan menyediakan forum untuk membahas permasalahan di lapangan yang diwujudkan melalui partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani (partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi). Dengan adanya program Rebo Distan Keliling (REBONDING) diharapkan terdapat pengaruh dengan tingkat keberdayaan (tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah, tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses, tingkat kemampuan menghadapi hambatan, dan tingkat kemampuan kerja sama dan solidaritas).

#### **2.4 Hipotesis Penelitian**

Menurut (Sugiyono, 2022, hlm.63) hipotesis adalah istilah yang digunakan untuk menguraikan suatu situasi atau kondisi tertentu setelah pertanyaan penelitian seseorang terjawab dalam bentuk pertanyaan. Hal tersebut, sebagai jawaban awal bersifat teoritis karena didasarkan pada konsep-konsep yang relevan, tetapi belum diperkuat dengan bukti empiris yang ditemukan dalam kenyataan ini adalah respon yang muncul dari pemahaman teoritis terhadap permasalahan yang diajukan, meskipun belum didukung oleh data empiris yang dapat memberikan validitas lebih lanjut.

Dari kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka konseptual yang sudah dirumuskan itu merupakan dasar dari peneliti guna merumuskan hipotesis dalam penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka hipotesis penelitiannya yaitu:

- H1 : Terdapat pengaruh partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani pada program Rebo Distan Keliling (REBONDING) terhadap tingkat keberdayaan.
- H0 : Tidak terdapat pengaruh partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani pada program Rebo Distan Keliling (REBONDING) terhadap tingkat keberdayaan.